

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdullah, H. Rozali, 2002, *Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1984, *Dekonsentrasi/Desentralisasi dan Pembangunan di Irian Jaya*, Jakarta.
- Gunadi, *Retribusi Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1997.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid III Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Josef Kaho Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, PT RajaGrafindo Perkasa, Jakarta.
- Law Education, *Transportasi Sebagai Aktivitas*.
- Mamesa, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Perpustakaan KP Pertamina.
- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi:Karakteristik, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Satrio Sang Raksono, Aditya Anwar, Pradoto Imam Santoso: *Kajian Ekonomi Akibat Kerusakan Jalan Nasional di Lintas Timur Sumatera*, Sumatera Utara, 2009.
- Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Ketiga, Jakarta, Rajawali, 1986.

UN-ESCAP, *Inter-island Shipping: Issues and Strategies A Pilot Study on the Alleviation of Poverty in Remote Island Communities in Indonesia*, New York, 1999.

Warsito, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*, Diponegoro University, Semarang.

Yuswanto, S.H., M.H., *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Ditjen Perhubungan Darat: KM 5 Tahun 1995

Ditjen Perhubungan Darat: KM 55 Tahun 1999, KM 1 Tahun 2000, KM 13 Tahun 2001, dan KM 1 Tahun 2003.

Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jembatan Timbang dan Terminal.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan Angkutan Barang Pemerintah Provinsi Lampung.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sumber-Sumber Lain

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/11/04492054/Galakan.Jembatn.Timbang>, oleh Harian Kompas | Kompas TV, pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014.

http://www.scribd.com/doc/204844381/Studi-Kelayakan-Jalan-Lintas-Utara-Timur-Lintas-Barat-Selatan-Dan-Lintas-Tengah#force_seo, oleh Alfrytha Palimbunga, pada tanggal 5 Februari 2014.

<http://sosekling.pu.go.id/database/database/penelitian/83>, Puslitbang Sosial Ekonomi Lingkungan, Jakarta Selatan.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/28/niun39-jembatan-timbang-jalan-lintas-di-lampung-akan-dihidupkan-kembali-pada-hari-Rabu-tanggal-28-Januari-2015-pukul-01:59-WIB>.